

STUDI KOMPARASI TENTANG EKONOMI PANCASILA DAN EKONOMI ISLAM

(Perbandingan Pemikiran Mubyarto dan Muhammad Abdul
Mannan)

A.Sofyan Alnashr

Alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: softyahn@gmail.com

Muzayyanah

Alumnus Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Pesantren Mathali'ul
Falah

Abstract

Indonesia is a country that uses a system of Pancasila economy, the economic system imbued with the ideology of Pancasila which is a joint effort is based on familial and national mutual cooperation. When viewed in terms of religion embraced by its people, the majority of Indonesian people are Muslim. Therefore, should the principles contained in the Pancasila economy inclines to the principles of Islamic Economics. Principles of Islamic Economics leads to a goal for the welfare of society. In reality the people of Indonesia are still many who have not been prosperous. It becomes important to study because, according to some researchers are assuming the principles of Pancasila economy is not in accordance with the principles of Islamic Economics and of course it is not justified in view of the majority of Indonesian people are Muslim. This type of research is a library research qualitative, where the processing of the data is not based on calculation of statistics. Analysis of the data used in this study is a comparative analysis constant, which are placed as close watch on the results of the data reduction procedure or the processing of data in order to establish the reliability of building concepts, categories, generalization or with the overall findings of the study itself so'm really solid (match) with the data and the reality on the ground. The results showed that between Economy and Economic Pancasila Pancasila according Mubyarto according to Mohammed Abdul Mannan

there are similarities in terms of principle, namely the principle of kinship and brotherhood. The principles applied in Indonesia in the form of cooperatives.

Keywords: *Pancasila Economics, Islamic Economics, Kinship.*

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang dijiwai ideologi Pancasila yang merupakan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Jika dilihat dari segi agama yang dianut oleh masyarakatnya, maka mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, selayaknya prinsip-prinsip yang ada dalam Ekonomi Pancasila lebih condong pada prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam mengarah pada tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pada realitanya masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sejahtera. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena menurut asumsi sementara peneliti adalah prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan tentu saja hal tersebut tidak wajar jika melihat mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif, dimana dalam proses pengolahan datanya tidak berdasarkan perhitungan angka-angka statistik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparasi secara konstan (constant comparative analysis), yakni yang lebih ditempatkan sebagai prosedur mencermati hasil reduksi data atau pengolahan data guna memantapkan keterandalan bangunan konsep, kategori, generalisasi atau beserta keseluruhan temuan penelitian itu sendiri sehingga benar-benar padu (match) dengan data maupun dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto dan Ekonomi Pancasila menurut Muhammad Abdul Mannan terdapat kesamaan dalam hal prinsipnya, yaitu prinsip kekeluargaan dan persaudaraan. Prinsip tersebut diaplikasikan di Indonesia dalam bentuk Koperasi.

Kata kunci: *Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam, Kekeluargaan.*

A. Pendahuluan

Ekonomi Indonesia yang bersumber pada ideologi Pancasila dengan cara mewujudkan amanat pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya adalah sistem ekonomi kerakyatan yang sekaligus bersifat

moralistik (mengacu pada Ketuhanan Yang Maha Esa) yang menjamin ketangguhan dan keandalan ekonomi nasional.¹ Dalam sistem Ekonomi Pancasila kita menganut paham yang menolak asas persaingan yang terlalu bebas seperti sistem Ekonomi Kapitalis Liberal. Sistem yang lebih tepat adalah sistem ekonomi yang berdasar asas kekeluargaan.² Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka semestinya sistem Ekonomi yang digunakan lebih condong kepada Ekonomi Islam baik dalam hal prinsip-prinsipnya maupun prakteknya.

Prof. M. Abdul Manan, MA, Ph.D, memberikan definisi ilmu ekonomi Islam, yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³ Ekonomi Islam bukan saja mempelajari individual sosial tetapi juga tanggung jawab moral kepada sang pencipta sehingga tidak hanya memberikan keuntungan di dunia melainkan keuntungan di akhirat juga. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perekonomian guna dapat mengatur hubungan antara manusia secara keseluruhan, maka diperlukan rancang bangun sebuah sistem yang utuh yakni prinsip ekonomi yang bersumber al-Qur'an dan al-Hadits,

¹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 5.

² Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto...*, hlm. 43.

³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19.

sedangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan teknis terdapat dalam bentuk Ijma, Ijtihad dan Qiyas.⁴

Menurut Muhammad Abdul Mannan prinsip dasar ajaran Ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan. Ciri khas konsep Persaudaraan Islami terletak dalam kenyataan bahwa Islam mengenyahkan semua kegiatan ekonomi anti sosial yang tidak mendorong pada kesejahteraan bersama.⁵ Prinsip-prinsip Ekonomi Islam mengarah pada tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pada realitanya masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sejahtera. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena menurut asumsi sementara peneliti adalah prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan tentu saja hal tersebut tidak wajar jika melihat mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif, dimana dalam proses pengolahan datanya tidak berdasarkan perhitungan angka-angka statistik.⁶ Penelitian ini mengarah kepada analisis mengenai perbandingan antara Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam. Data yang dikumpulkan adalah data kepustakaan yang terdiri dari data primer dan data

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.8

⁵ M.Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 341.

⁶ Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Granit, 2004), hlm. 128.

sekunder. Data primer diperoleh dari sejumlah buku yang membahas tentang Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam. Diantara bukunya yaitu *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran* Mubyarto karya Mubyarto yang membahas tentang ekonomi pancasila, buku yang berjudul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* karya M. Abdul Mannan yang membahas ekonomi islam. Sedangkan data sekunder diambil dari tulisantulisan yang membahas tentang teori ekonomi pancasila dan ekonomi islam serta data lain yang menunjang, diantaranya dokumen-dokumen yang didapat dari jurnal, buletin dan sebagainya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparasi secara konstan (*constant comparative analysis*), yakni yang lebih ditempatkan sebagai prosedur mencermati hasil reduksi data atau pengolahan data guna memantapkan keterandalan bangunan konsep, kategori, generalisasi atau beserta keseluruhan temuan penelitian itu sendiri sehingga benar-benar padu (*match*) dengan data maupun dengan kenyataan di lapangan.⁷

C. Teori Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto

1. Biografi Mubyarto

Mubyarto lahir di desa Demak Ijo, kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ia lahir sebagai anak ketujuh dari delapan bersaudara dari pasangan Martodinoto dan Sumirah. Sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarganya, Muby-demikian ia biasa disapa oleh para karib dan

⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.71-72.

muridnya- yang lahir pada hari Sabtu, 3 September 1938, mendapat perhatian lebih dari orang tuanya.⁸ Sewaktu kecil, prestasi Mubyarto sebenarnya biasa saja. Ia masuk Sekolah Rakyat pada usia yang sangat muda, 5 tahun. Minat bacanya mulai terlihat saat ia duduk di kelas 6, dimana ia rajin melahap berbagai buku dan surat kabar setiap hari. Setelah lulus dari SD Demak Ijo pada 1950, ia melanjutkan sekolahnya di SMP 3 Yogyakarta.⁹

Pada tahun 1956 ia bisa diterima di Fakultas Ekonomi UGM tanpa tes. Bukan hanya itu, akhirnya ia juga mendapatkan beasiswa dari kampus untuk membiayai kuliahnya, sesuatu yang membanggakan kedua orang tuanya. Di UGM Mubyarto memilih Jurusan Agraria sebagai pilihan studi. Ia memilih jurusan tersebut karena memiliki obsesi untuk memperbaiki nasib para petani. Oleh karena itu, meskipun jurusan itu tergolong sepi peminat, Mubyarto tetap setia dengan pilihannya. Pada 1959 ia berhasil menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda (B.Sc.) dengan predikat sangat memuaskan. Pada tahun itu pula, ia resmi diangkat menjadi tenaga pengajar oleh almamaternya dan dikirim ke Vanderbilt University, Amerika Serikat, untuk melanjutkan pendidikan di bidang Ekonomi Pembangunan.¹⁰

⁸ Ahmad Nashih Luthfi, dkk, *Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto*, (Sleman: STPN Press bekerja sama dengan Sajogyo Institute Bogor, 2010), hlm. 223.

⁹ Ahmad Nashih Luthfi, dkk, *Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto...*, hlm. 224.

¹⁰ Ahmad Nashih Luthfi, dkk, *Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto...*, hlm. 224-225.

Karya Mubyarto telah mengisi khazanah keilmuan di Indonesia. Hasil karyanya meliputi bidang ekonomi, pertanian, kemiskinan, dan lain-lain. Karya-karya yang telah dipublikasikan antara lain: Pengantar Ekonomi Pertanian, LP3ES (1972), Politik Pertanian dan Pengembangan Pedesaan, Sinar Harapan (1980), Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, LP3ES (1981), Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, LP3ES (1987), Ekonomi dan Keadilan Sosial, Aditya Media (1995), Kisah-Kisah IDT (Penyunting), Aditya Media (1997), Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto, Aditya Media (1997), Membangun Sistem Ekonomi, BPFE (2000), Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, BPFE (2001), *A Development Alternative for Indonesia*, Gajah Mada University Press (2002).¹¹

Hampir sepanjang tahun 2004 Mubyarto tak kurang menulis 6 buah buku terkait dengan dunia Pendidikan, terutama mengenai pengajaran Ekonomi. Buku-buku itu adalah Pendidikan Ekonomi Kita (Januari, 2004), Pendidikan Ekonomi Alternatif di Sekolah-sekolah Lanjutan (Maret, 2004), Belajar Ilmu Ekonomi (Juli, 2004), Pendidikan Ekonomi Sekolah Lanjutan (Agustus, 2004), Ekonomi Rakyat Nganjuk (Desember, 2004), dan Menggugat Sistem Pendidikan Ekonomi Nasional (Januari, 2005).¹² Selasa, 24 Mei 2005, Sang “Legenda

¹¹ Arif Sholeh, *Skripsi Konsep Pembangunan Ekonomi: Studi Komparatif Pemikiran Mubyarto dan Umer Chapra*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 32.

¹² Ahmad Nashih Luthfi, dkk, *Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto*, (Sleman, STPN Press bekerja sama dengan Sajogyo Institute Bogor: 2010), hlm. 220.

Ekonomi Pancasila” ini tutup usia di Rumah Sakit Umum Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta.¹³

Mubyarto adalah satu diantara dari sedikit orang yang kepergiannya diulas sedemikian rupa, sampai perlu ditulis dalam tajuk rencana oleh berbagai Surat Kabar. Tak kurang harian nasional seperti Media Indonesia, Kompas, serta Kedaulatan rakyat di Yogya, merasa perlu untuk menulis kepergian Mubyarto dalam tajuk mereka, selain tentu saja memuat tulisan obituari serta sejumlah artikel opini sebagaimana lazimnya. Jika menyimak kliping surat kabar yang terbit waktu itu, baik lokal maupun nasional, berita kepergian Mubyarto umumnya ditempatkan di halaman pertama.¹⁴

2. Teori Ekonomi Pancasila

Meski sebagai sebuah istilah Ekonomi Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Emil Salim, dalam perjalanannya istilah tersebut kemudian lebih lekat dengan nama Mubyarto. Memang, Mubyarto-lah yang kemudian serius mengembangkan gagasan tersebut, baik dalam wilayah keilmuan maupun sebagai identitas bagi praksis kebijakan. Pada 19 September 1980, atas inisiatif Mubyarto pula, gagasan Ekonomi Pancasila untuk pertama kalinya diseminarkan, bertepatan dengan Dies Natalis Fakultas Ekonomi UGM ke-25.

Ada 18 orang sarjana yang memberikan sumbangan pemikiran kala itu, dari sudut makro ekonomi, mikro ekonomi, teori

¹³ Ahmad Nashih Luthfi, dkk, *Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto...*, hlm. 209.

¹⁴ Ahmad Nashih Luthfi, dkk, *Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto...*, hlm. 210-211.

pembangunan, etika ekonomi dan gagasan mengenai konsep manusia Indonesia untuk menyempurnakan konsep homo economicus. Kumpulan makalah dalam seminar itu dibukukan dan diterbitkan oleh BPFE (Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi) Universitas Gadjah Mada. Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah sistem perekonomian nasional dengan produksi dan distribusi hasil produksi dikerjakan dalam bentuk usaha-usaha bersama dilandasi asas-asas kekeluargaan.¹⁵

Ekonomi Pancasila tidak liberal-kapitalistik, juga bukan sistem ekonomi yang etastik. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian, tentulah dengan peran aktif negara dalam mengontrol pasar.¹⁶ Sistem perekonomian Pancasila adalah sebagaimana tertulis pada pasal 33 UUD 1945 yaitu:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁷

Sistem Ekonomi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

¹⁵ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 239.

¹⁶ Mubyarto dan Boediono, *Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: BPFE, 1981), hlm. 31.

¹⁷ Mubyarto dan Boediono, *Ekonomi Pancasila...*, hlm. 65.

- a. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral; Dalam masyarakat Pancasila, ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi,¹⁸ yaitu harga melalui sistem pasar dengan sekaligus ada pengontrolan sosial atau pengawasan oleh masyarakat dan pedoman moral oleh seluruh bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial, sesuai asas-asas kemanusiaan; Semangat kekeluargaan, cinta-mencintai, tenggang rasa, bila sudah merata pada seluruh anggota masyarakat, akan menjelma menjadi semangat solidaritas sosial menuju pemerataan sosial. Inilah manifestasi dari sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
- c. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi; Prioritas kebijakan ekonomi ialah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti bahwa nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. Hal ini sangat berbeda dengan ekonomi kapitalistik yang bersifat internasional, sejauh-jauhnya mencari pasar, jika perlu di luar batas-batas negara. Maka ada Multi National Cooperation (MNC) di mana batas negara tidak menjadi soal.

¹⁸ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 39.

Adapun sistem Ekonomi Pancasila memberikan prioritas yang tinggi pada ekonomi nasional.¹⁹

- d. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkret dari usaha bersama; Sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, asas kerakyatan dan persatuan lebih menegaskan tentang relevansi organisasi koperasi, sebagai organisasi ekonomi yang demokratis dan berwatak sosial. Anggota tidak tinggal diam dan kemudian mendapat bagian keuntungan. Baik dalam koperasi produksi maupun simpan pinjam, selalu didorong simpanan atau tabungan wajib dan rutin, agar peran serta anggota bersifat aktif dan dinamis mengembangkan organisasi.²⁰
- e. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.²¹ Sistem perekonomian Pancasila, harus tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi. Ada perimbangan yang jelas antara

¹⁹ Ekko Eddy Supriyanto, *Artikel Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Ekonomi Di Kabupaten Tegal 2009-2014*, diakses pada tanggal 9 Juli 2015 pukul 11.45 WIB.

²⁰ Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 75.

²¹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 103.

perencanaan pada tingkat nasional dengan desentralisasi dari rencana-rencana pusat tersebut di daerah-daerah.²²

Ada beberapa prinsip yang ada dalam Ekonomi Pancasila, di antaranya yaitu prinsip keadilan sosial dan kekeluargaan. Keadilan Sosial adalah sila kelima dalam Pancasila. Sila kelima ini tidak lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.²³

Dalam sistem ekonomi Pancasila kita menganut paham yang menolak asas persaingan yang terlalu bebas seperti sistem ekonomi kapitalis liberal. Sistem yang lebih tepat adalah sistem ekonomi yang berdasar asas kekeluargaan.²⁴ Sistem ekonomi kekeluargaan atau kelembagaan yang diamanatkan oleh Pancasila adalah sistem ekonomi kekeluargaan, penjelasannya sistem ekonomi kapitalis yang mengabsahkan penindasan kepada yang lemah, eksploitasi,

²² Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 42.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Artikel Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, (Malang, 12 April 2011), diakses pada tanggal 9 Juli 2015 pukul 11.05 WIB.

²⁴ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 43.

individualisme sedangkan sistem ekonomi kekeluargaan tidak ada penindasan.

Semuanya diatur secara keluarga pastinya hal-hal yang bersifat musyawarah dan mufakat yang tentunya sudah di jabarkan dalam pasal 33. Sistem ekonomi kekeluargaan juga dapat diartikan membangun perekonomian secara mandiri dengan pengertian tidak diperbolehkan menggantungkan pada asing atau biasa disebut ekonomi kerakyatan (Pancasila sebagai cita-cita dan UUD 1945 sebagai cara untuk mencapai cita-cita tersebut) oleh karena itu Pancasila harus jadi acuan pasal-pasal UUD 1945.²⁵

D. Teori Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan

1. Biografi Muhammad Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan dilahirkan di Bangladesh tahun 1918. Mannan menikah dengan seorang wanita bernama Nargis Mannan yang bergelar master di bidang ilmu politik. Mannan menerima gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajshahi pada tahun 1960. Setelah menerima gelar master ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Ia asisten pimpinan di the Federal Planning Commission of Pakistan pada tahun 1960-an. Setelah menyelesaikan program doktor-nya, Mannan menjadi dosen senior dan aktif mengajar di Papua New Guinea University of Technology. Di sana ia juga ditunjuk sebagai Pembantu Dekan.

²⁵ Ekko Eddy Supriyanto, *Artikel Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Ekonomi Di Kabupaten Tegal 2009-2014*, diakses pada tanggal 9 Juli 2015 pukul 11.45 WIB.

Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai Profesor di Internasional Centre for Research in Islamic Economics, Universitas King Abdul Azis, di Jeddah. Selama periode tersebut, Mannan juga aktif sebagai visiting profesor pada Moeslim Institute di London dan Georgetown University di Amerika Serikat. Melalui pengalaman akademiknya yang panjang, Mannan memutuskan bergabung dengan Islamic Development Bank dan sejak 1984 ia menjadi ahli Ekonomi (Islam) senior di IDB.²⁶

Beberapa karya Mannan antara lain adalah *An Introduction to Applied Economy* (Dhaka:1963), *Economic Problem and Planning in Pakistan* (Lahore:1968), *The Making of Islamic economic Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis* (Kairo:1984) dan *The Frontier of Islamic Economics* (India: 1984), *Economic Development and Social Peace in Islam* (UK: 1989), *Management of Zakah in Modern Society* (IDB: 1989), *Developing a System of Islamic Financial Instruments* (IDB: 1990), *Understanding Islamic Finance: A Study of Security Market in an Islamic Framework* (IDB: 1993), *International Economic Relation from Islamic Perspectives* (IDB:1992), *Structural Adjustments and Islamic Voluntary sector with special reference to Bangladesh* (IDB: 1995), *The Impact of Single European Market on OIC Member Countries*, (IDB: 1996), *Financing Development in Islam* (IDB: 1996).²⁷

²⁶ Ekko Eddy Supriyanto, *Artikel Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Ekonomi Di Kabupaten Tegal 2009-2014...*, hlm. 21.

²⁷ Muhammad Abdul Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Terj. Tjasmijanto dan Rozdiyanti (Depok: CIBER dan PKKT-UI, 2001), hlm. 105-106.

Itulah karya-karya Mannan tentang ekonomi Islam yang memberikan seumbangsiah bagi dunia.

2. Teori Ekonomi Islam

Prof. M. Abdul Manan, MA, Ph.D, memberikan definisi ilmu Ekonomi Islam, yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁸ Pemahaman Mannan terhadap Ekonomi Islam berada pada sudut pandang mainstream. Madzhab pemikiran ini menganggap bahwa masalah ekonomi muncul karena keterbatasan sumber daya yang ada (negara/tempat) yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas.²⁹

Ekonomi Islam bukan saja mempelajari individual sosial tetapi juga tanggung jawab moral kepada sang pencipta sehingga tidak hanya memberikan keuntungan di dunia melainkan keuntungan di akhirat juga. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perekonomian guna dapat mengatur hubungan antara manusia secara keseluruhan, maka diperlukan rancang bangun sebuah sistem yang utuh yakni prinsip ekonomi yang bersumber al-Qur'an dan al-Hadits, sedangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan teknis terdapat dalam bentuk Ijma, Ijtihad dan Qiyas.³⁰

²⁸ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 19.

²⁹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IITI, 2004), hlm. 48-49.

³⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.8

Sistem Ekonomi Islam merupakan sistem yang berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme. Namun merupakan Ummatan Wasathan, yaitu umat yang menganut sistem yang tidak ekstrem melainkan berada di tengah-tengah dan mengambil keuntungan atau manfaat serta melepas sifat buruk dari kedua sistem tersebut. Dalam perspektif Muhammad Abdul Mannan prinsip dasar ajaran ekonomi Islam adalah berdasarkan konsep persaudaraan. Konsep Islam tentang persaudaraan membedakannya dari sistem sosial lain seperti dalam bidang moral, sosial dan ekonomi.

Dalam bidang moral, shalat mempunyai peranan menentukan. Dalam Islam shalat berlaku dalam banyak cara. Cara yang terpenting *pertama*, ialah shalat lima waktu sehari. Ibadat ini dapat dipimpin oleh seorang dari jemaah, lebih diutamakan orang yang terbaik dalam memahami Al Qur'an. Tidak ada pendeta atau sesuatu yang disarankan dengan pentasbih. Setiap Muslim sanggup, atau harus sanggup untuk memimpin jemaah dalam ibadat. *Kedua*, dalam suasana sosial, konsep persaudaraan Islami timbul dari pembaharuan spiritual bukan dari pembedahan sosial, yang merupakan satu-satunya senjata untuk menjamin keamanan sosial dalam komunisme.

Dalam Al Qur'an dinyatakan bahwa Allah telah membagi umat manusia dalam rumpun dan bangsa agar mereka memperoleh lebih banyak kemudahan dalam pergaulan.³¹ Selain itu, para ahli Ekonomi Islam telah merumuskan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, meskipun ada

³¹ M. A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 338-339.

perbedaan dalam tata urutan tetapi substansinya sama antara satu sama lain. Prinsip-prinsip tersebut adalah nilai Ketuhanan, nilai Keadilan, nilai Kenabian, nilai Pemerintahan, dan hasil atau keuntungan.

E. Komparasi Pemikiran Mubyarto Dan Muhammad Abdul Mannan Dalam Konteks Prinsip-Prinsip Ekonomi Yang Dijalankan Di Indonesia

Bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai nilai-nilai dasar landasan kehidupannya, percaya bahwa moral kehidupan ekonominya berlandaskan moral Pancasila. Di Indonesia, diakui eksistensi dan hak hidup beberapa agama besar sebagaimana Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Nilai-nilai yang dikembangkan berasal dari beberapa agama termasuk nilai-nilai adat asli bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa.

Dalam hal itu, agama Islam dianut oleh bagian terbesar bangsa Indonesia, tampaknya juga paling besar perannya dalam mempengaruhi aturan-aturan nilainya. Misalnya, Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 mengatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat ini tampaknya sejalan dengan ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an:

Hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang, dan daripadanya (Allah) menciptakan pasangannya, dan daripada keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu selalu meminta satu sama lain, dan jagalah hubungan keluarga (4:1). Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara (49:10)

Pada dasarnya sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada rakyat yang lemah. Sistem ekonomi kerakyatan sesungguhnya tidak menafikan adanya mekanisme pasar. Namun berbeda dengan mekanisme pasar yang dianut oleh sistem ekonomi neoliberal, sistem ekonomi kerakyatan lebih mengedepankan perlindungan dan pemihakan bagi pelaku ekonomi lemah yang belum mampu bersaing secara bebas di pasar dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Menurut Mubyarto, Pancasila terdiri dari etika, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan/demokrasi dan keadilan sosial. Jika, sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat adalah caranya, maka sila kelima adalah tujuan dari ekonomi Pancasila.³²

Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama. Ini adalah nilai-nilai tradisional yang bersumber pada budaya Indonesia. Tapi asas kekeluargaan ini, yang berdasarkan kepada solidaritas mekanis, telah ditransformasikan menjadi solidaritas fungsional, dengan nilai-nilai individualitas dalam lembaga koperasi.³³ Hal ini tidak jauh berbeda dengan prinsip Ekonomi Islam menurut Muhammad

³² Murkhaer Pakkanna, *Ekonomi Pancasila Berwajah Islam?*, <http://www.stie.ad.ac.id/index.php/kolom-ketua209-ekonomi-islam-berwajah-pancasila?>, diakses pada 26 Agustus 2015, pukul 04.45 WIB

³³ Dawam Raharjo, *Artikel Ekonomi Pancasila dalam Tinjauan Filsafat Ilmu*, (6 Januari 2006), diakses pada tanggal 9 Juli 2015 pukul 11.09 WIB.

Abdul Mannan yang mengakui prinsip persaudaraan sebagai prinsip yang harus diterapkan dalam Perekonomian.

Aktualisasi pendapat M. Abdul Mannan tentang sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan dengan sistem ekonomi di Indonesia bisa berbentuk Koperasi. Koperasi merupakan satu diantara bentuk nyata dari prinsip kekeluargaan atau persaudaraan, kegotong royongan dan kerjasama, karena merupakan satu perantara orang yang kelebihan dana untuk membantu orang yang kekurangan dana. Ini menunjukkan bahwa antara prinsip Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto dan Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan tidak jauh berbeda. Maka, di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah muslim dan selama ini menggunakan sistem Ekonomi Pancasila sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan.

Pada dasarnya antara Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto dan Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan lebih menemukan kesamaan daripada perbedaannya seperti:

1. Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam mengutamakan prinsip persaudaraan, yakni menganggap bahwa setiap pelaku ekonomi merupakan saudara dan tidak membenarkan persaingan yang mengakibatkan ketidaksejahteraan masyarakatnya.
2. Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang prinsip dasarnya terletak pada agama dan

moral yakni harus percaya pada Tuhan dan tidak merugikan orang lain.

3. Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi campuran, artinya kedua sistem tersebut mengadaptasi hal positif dari sistem Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Sosialis.
4. Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam mengakui adanya mekanisme pasar
5. Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam memiliki satu prinsip yang sama yakni keadilan.

Keadilan yang dimaksud Mubyarto berupa keadilan sosial atau social justice yaitu suatu keadaan suasana kehidupan masyarakat yang warganya merasa aman dan tenteram, lahir batin, karena prinsip keadilan dianggap berlaku, diakuim disetujui masyarakat yang bersangkutan dan dilaksanakan secara tertib oleh seluruh anggota masyarakat.³⁴ Adapun keadilan dalam Ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan bertujuan untuk menghasilkan keseimbangan yang dapat berwujud menjadi pemecah kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Saling tolong menolong menjadi realisasi dari keadilan ini.

Letak perbedaan keduanya, Ekonomi mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar hukumnya, adapun

³⁴ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm.63.

A.Sofyan, *STUDI KOMPARASI TENTANG*

dasar hukum Ekonomi Islam adalah al-Qur'an, Hadis atau Sunah, Ijma', Ijtihad Istislah, Istishab, dan Istihsan.

F. Penutup

Dalam perspektif Muhammad Abdul Mannan prinsip dasar ajaran Ekonomi Islam adalah berdasarkan konsep persaudaraan. Konsep Islam tentang persaudaraan membedakannya dari sistem sosial lain seperti dalam bidang moral, sosial dan ekonomi. Aktualisasi pendapat M. Abdul Mannan tentang sistem Ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan dengan sistem ekonomi di Indonesia bisa berbentuk Koperasi. Hal ini sejalan dengan sistem Ekonomi Pancasila yang mana Koperasi merupakan sokoguru perekonomiannya. Koperasi adalah salah satu bentuk yang paling konkret dari usaha bersama.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah sistem perekonomian nasional dengan produksi dan distribusi hasil produksi dikerjakan dalam bentuk usahausaha bersama dilandasi asas-asas kekeluargaan. Prinsip dasar ekonomi Pancasila adalah keadilan dan Kekeluargaan. Keadilan yangmana merupakan tujuan akhir dari semua sila yang terdapat dalam Pancasila dan kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Prof. M. Abdul Manan, MA, Ph.D, memberikan definisi ilmu Ekonomi Islam, yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, *Artikel Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, (Malang, 12 April 2011), diakses pada tanggal 9 Juli 2015 pukul 11.05 WIB.
- Bungin, Burhan. 2007, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2004, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IITI.
- Luthfi, Ahmad Nashih, dkk. 2010, *Pemikiran Agraria Bulaksumur: Telaah Awal atas Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto*, Sleman: STPN Press bekerja sama dengan Sajogyo Institute Bogor.
- Mannan, M. Abdul. 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- _____, 2001, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Terj. Tjasmijanto dan Rozdiyanti, Depok: CIBER dan PKKT-UI.
- Mubyarto, 1997, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta: Aditya Media.
- _____, 1987, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta: LP3ES.
- _____, 1988, *Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila*, Jakarta: LP3ES.
- _____, dan Boediono, 1981, *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: BPFE.
- Pakkanna, Murkhaer, *Ekonomi Pancasila Berwajah Islam?*, <http://www.stie.ad.ac.id/index.php/kolom-ketua209-ekonomi->

- islam-berwajah-pancasila?, diakses pada 26 Agustus 2015, pukul 04.45 WIB.
- Raharjo, Dawam, *Artikel Ekonomi Pancasila dalam Tinjauan Filsafat Ilmu*, (6 Januari 2006), diakses pada tanggal 9 Juli 2015 pukul 11.09 WIB.
- Rahman, Afzalur. 1995, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 1, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rianto. 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Granit.
- Sholeh, Arif, 2011, *Skripsi Konsep Pembangunan Ekonomi: Studi Komparatif Pemikiran Mubyarto dan Umer Chapra*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Supriyanto, Ekko Eddy, *Artikel Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Ekonomi Di Kabupaten Tegal 2009-2014*, diakses pada tanggal 9 Juli 2015 pukul 11.45 WIB.